



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR 25²⁵ TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI TEMPAT UJI KOMPETENSI
PENGADAAN BARANG/JASA MANDIRI (TUK PBJ MANDIRI)

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa, dipandang perlu adanya TUK PBJ Mandiri;
- b. bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Selatan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai TUK PBJ Mandiri sesuai dengan Pedoman Pembentukan Tempat Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5/BNSP/VII/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;
4. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penunjukan Direktorat Sertifikasi Profesi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak II (LSP Pihak II);
5. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Sistem Manajemen Mutu Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Penetapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Tempat Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Mandiri (TUK PBJ Mandiri).
- KESATU : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini ditetapkan sebagai TUK PBJ Mandiri.
- KEDUA : Status Penetapan sebagai TUK PBJ Mandiri diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Perpanjangan status Penetapan sebagai TUK PBJ Mandiri diusulkan oleh Kepala TUK PBJ Mandiri.
- KEEMPAT : TUK PBJ Mandiri sebagaimana DIKTUM KESATU memiliki tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana diatur dalam pedoman Pembentukan Tempat Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa.
- KELIMA : TUK PBJ Mandiri sebagaimana DIKTUM KESATU, apabila tidak melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta 5
pada tanggal 5 Agustus 2019
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA,

ttd

ROBIN ASAD SURYO

Tembusan:

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

jdih.lkpp.go.id